

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen ke tiga menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum<sup>1</sup> amandemen Undang Undang Dasar Negara republik Indonesia 1945 perihal hal ini hanya di penjelasan umumnyabahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machsstaat*) konsep negara hukum bercirikan adanya pembagian kekuasaan (*machten-scheiding*) pemencaran kekuasaan negara (*spreading van de staats-macht*) pengakuan hak asasi manusia trias politka dan pemerintahan yang berdasarkan undang undang (asas legalitas). Konsep negara hukum bertujuan untuk menghindarkan negara atau pemerintahan bertindak sewenang wenang dengan kata lain konsep negara hukum bertujuan untuk membatasi kekuasaan negara atau pemerintah kekuasaan pemerintah yang terbatas atau di batasi merupakan satu ciri dari pemerintahan yang berkedaulatan rakyat

Sejak reformasi perubahan Undang Undang Dasar 1945 telah dilakukan secara bertahap sebanyak empat kali yakni : perubahan pertama dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tanggal 19 Oktober 1999 perubahan kedua dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tanggal 18 Agustus 2000 perubahan ketiga dilakukan Majelis Permusawaratan Rakyat pada tanggal 9 Nopember 2001 dan perubahan keempat dilakukan majelis permusyawaratan rakyat pada tanggal 10 Agustus 2002 telah menghasilkan struktur kelembagaan negara yang berbeda dengan struktur kelembagaan negara sebelumnya dan sekaligus merupakan bukti, bahwa adanya keinginan

---

<sup>1</sup> pasal 1 Undang-Undang Dasar NRI 1945

terwujudnya struktur ketatanegaraan Republik Indonesia ke arah yang lebih demokratis dengan saling melakukan kontrol (*checks and balances*) perubahan Undang Undang Dasar 1945 (1999-2002) telah membawa semangat baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, baik dalam pelembagaan kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudisial (kekuasaan kehakiman). Dalam sistem kekuasaan pembentukan Mahkamah Konstitusi pada setiap negara memiliki latar belakang yang beragam, tetapi secara umum pembentukan Mahkamah Konstitusi berawal dari suatu proses perubahan politik kekuasaan yang otoriter menuju demokrasi penolakan terhadap otoritarianisme berdampak pada tuntutan penyelenggaraan negara secara demokratis dan menghargai hak asasi manusia.

Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi tidak lain merupakan dorongan dalam penyelenggaraan kekuasaan dan ketatanegaraan yang lebih baik. Pemikiran mengenai pentingnya suatu pengadilan konstitusi telah muncul. Mahkamah Konstitusi menjadi kenyataan dengan disahkannya Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C Undang Undang Dasar 1945 yang menjadi bagian Perubahan Keempat Undang Undang Dasar NRI 1945 pada ST MPR 2001 tanggal 9 November 2001. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah salah satu pelaku kekuasaan Kehakiman Disamping Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki 4 (empat) kewenangan dan satu kewajiban, adapun kewenangan tersebut yaitu: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Adapun kewajibannya yaitu Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden

dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar *constitutional review* pengujian Undang-Undang (*judicial review*)<sup>2</sup> sendiri di Indonesia dilaksanakan oleh dua *constitutional review* lembaga peradilan yang berbeda, yakni Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung<sup>3</sup>

Pengujian Undang-Undang di Indonesia dikenal dengan istilah *judicial review*. *Judicial review* sendiri memiliki perbedaan pengertian yang mendasar dengan istilah atau pengujian konstitusional *judicial review* memiliki kajian yang lebih luas dari karena bukan hanya menguji produk Perundang-undangan berbentuk Undang-Undang, tetapi mencakup pula peraturan Undang-Undang di bawah Undang-Undang pengujiannya pun tidak hanya persoalan Konstitusionalitas nya melainkan juga dapat diuji legalitas dari produk undang-Undang tersebut namun di sisi lain *judicial review* memiliki pengertian yang lebih sempit karena kewenangan pengujian ini hanya dilakukan oleh hakim atau lembaga judisial. Sedangkan *constitutional review* memiliki pengertian lebih luas, karena subjek yang mengujinya bisa lembaga selain peradilan tergantung lembaga mana yang diberi kewenangan oleh konstitusi negara tersebut<sup>4</sup>

Pengujian Undang-Undang (*judicial review*) dimaksudkan untuk menjaga agar Undang-Undang yang dibuat oleh lembaga legislatif tidak bertentangan dengan Undang Undang Dasar NRI 1945 dan memberi perlindungan hak konstitusional warga negara di dalam ketentuan Undang Undang Dasar NRI 1945 banyak disebutkan bahwa untuk hal-hal tertentu diperlukan undang-

---

<sup>2</sup> pasal 24 Undang Undang Dasar NRI 1945

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi HTN Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004 hlm. 187.

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara* Jakarta Konstitusi Press, 2006 hlm

undang sebagai pelaksanaan ketentuan Undang Undang Dasar NRI 1945 namun hal ini tidaklah berarti bahwa lembaga legislatif hanya buat Undang-Undang yang diperintahkan secara langsung oleh Undang-Undang Dasar NRI 1945 saja (Undang-Undang organik) untuk menguji sifat konstitusional dari sebuah Undang-Undang maka paham konstitusionalisme adalah paham yang tepat untuk diwujudkan, yakni bahwa setiap kewenangan kenegaraan haruslah dibatasi karena dengan adanya pembatasan tersebut hak-hak masyarakat sipil tetap terjamin. meskipun lembaga legislatif adalah wakil rakyat dan kepadanya diberikan wewenang yang luas oleh Undang-Undang Dasar untuk membuat Undang-Undang, tidak berarti bahwa kewenangan lembaga legislatif tersebut mutlak dalam pembatasan tersebut upaya warga negara dalam melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah upaya untuk memperjuangkan hak-hak Konstitusionalnya yang belum diakomodir dengan baik di dalam Undang-Undang yang belum mencerminkan tiga hal utama dalam sebuah aturan hukum yakni memberikan kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan melalui putusan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945 oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>5</sup>

Putusan inkonstitusional bersyarat adalah putusan yang memberikan batasan (syarat-syarat) terhadap pasal yang di putuskan Mahkamah. Pada saat putusan dibacakan adalah inkonstitusional, akan tetapi pasal tersebut akan menjadi konstitusional apabila syarat sebagaimana ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dipenuhi sedangkan putusan inkonstitusional bersyarat pertama kali dipraktikkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009](#) tanggal 24 Maret 2009 tentang pengujian pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang 10/2008 dan pasal 58 huruf f [Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang](#)

---

<sup>5</sup>Harjono, *Transformasi Demokrasi* Jakarta Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2009 hlm.138.139

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemberlakuan pasal-pasal tersebut melanggar asas persamaan di hadapan hukum melanggar hak untuk Memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang Undang Dasar NRI 1945. Oleh dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi Menyatakan bahwa Pasal tersebut bertentangan dengan Undang Undang Dasar NRI 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai berikut tidak berlaku untuk jabatan yang dipilih (*elected officials*) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) hari sejak terpidana selesai menjalani hukumannya dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan narapidana bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dalam beberapa tahun terakhir, terjadi perkembangan yang menarik dalam pengujian Undang-Undang, khususnya dalam hal putusan yang dijatuhkan Mahkamah Konstitusi.

Jika semula putusan hanya berupa amar yang mengabulkan permohonan, menyatakan permohonan tidak dapat diterima dan menolak permohonan untuk sebagian atau seluruhnya dengan menyatakan suatu Undang-Undang pasal ayat atau frasa bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 dan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*legally null and void*) sebagaimana yang diatur dalam pasal 56 ayat (3) dan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada perkembangannya Mahkamah Konstitusi pun menciptakan varian putusan yakni konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) putusan yang menunda pemberlakuan putusan (*limited constitutional*), dan putusan yang merumuskan norma baru sebagaimana ditemukan pada

penelitian sebelumnya dengan keempat varian putusan ini seringkali Mahkamah Konstitusi dinilai telah mengubah perannya dari *negative legislature* menjadi *positive legislature* artinya Mahkamah Konstitusi menjadikan dirinya sebagai kamarketiga dalam proses legislasi karena tidak dapat dipungkiri varian-varian Putusan tersebut dapat mempengaruhi proses legislasi di lembaga legislatif terlepas dari polemik itu, inilah alat kontrol eksternal yang dimiliki Mahkamah Konstitusi untuk melakukan purifikasi atas produk hukum yang dihasilkan lembaga legislative dari varian-varian putusan di atas, seperti dalam putusan konstitusional bersyarat dan putusan inkonstitusional bersyarat

Putusan Mahkamah Konstitusi seyogianya bisa mengakhiri polemik tentang Peninjauan Kembali (PK) oleh jaksa dalam putusan No. 33/PUU-XIV/2016, Mahkamah memutuskan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang Uundang Dasar NRI 1945 jika dibaca lain daripada yang dimaksud dalam pasal *a quo* pasal tersebut sudah jelas menyebut yang berhak mengajukan peninjauan Kembali adalah terpidana atau ahli warisnya. Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusi

Masalah Peninjauan Kembali (PK) perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap belakangan menimbulkan perdebatan di berbagai kalangan. Pemikiran Moh. Mahfud MD dan M. Khoidin yang dimuat di dalam Republika edisi 2 Desember 1996, memunculkan perbedaan yang mencolok tentang penafsiran isi Pasal 263 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana sementara Achmad Ali, dekan Fakultas humas universitas Hasanuddin meninjau isi Pasal 263 Kitab Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dari segi pengetahuan

hukum dan ilmu hukum<sup>6</sup>

Perdebatan boleh tidaknya jaksa mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) masih saja mengemuka kali ini, perdebatan yang cukup usang ini terjadi di luar persidangan peninjauan kembali pembunuhan aktivis hak asasi manusia (HAM), Munir. Istri terdakwa Pollycarpus, Yosepha Hera Iswandari, mempertanyakan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Kejaksaan. Serta dalam kasus Pollycarpus, dimana hakim mengabulkan upaya hukum yang berbagai contoh ketidak pastian upaya hukum Peninjauan Kembali yakni Kasus Mochtar Pakpahan yang peninjauan kembali nya diajukan oleh Jaksa, yang jelas - jelas dalam Undang Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana Pasal 263 ayat (1) yang berbunyi : *Bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali Putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali*, kepada Mahkamah Agung kasus Mochtar Pakpahan inilah yang membuat upaya hukum Peninjauan Kembali menjadi kontroversi dikalangan penegak hukum pakar hukum maupun masyarakat di Indonesia diajukan jaksa penuntut umum<sup>7</sup>

Di antara aparat penegak hukum yang paling dominan dalam melaksanakan penegakan hukum ialah hakim Hakimlah yang pada akhirnya menentukan putusan terhadap suatu perkara disandarkan pada intelektual, moral dan integritas hakim terhadap nilai nilai keadilan. Kekuasaan

---

<sup>6</sup>Bachtiar Sitanggang, Senin, 3 Februari 1997, *Hakikat Peninjauan Kembali atas Suatu Perkara Pidana*,

INDONESIA-P Kompas Online, [www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1997/02/020027](http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1997/02/020027).di unduh 28 maret 2017

<sup>7</sup>Harian Kompas, *Wewenang Jaksa Mengajukan PK Kembali Dipersoalkan*, Edisi 12- Agustus-2008, Jakarta.di unduh 25 mei 2017

Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, seperti yang dinyatakan dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Keadilan Substantif dalam Black's Law Dictionary 7th Edition dimaknai bahwa keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan substantif, dengan tidak melihat kesalahan-kesalahan dalam proses prosedural yang tidak terpengaruh pada hak-hak substantif penggugat ini berarti bahwa apa yang secara formal prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan demikian sebaliknya apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil dengan kata lain.

Keadilan Substantif berarti putusan hakim bisa mengabaikan bunyi undang-undang jika Undang-Undang tidak memberikan rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal prosedural undang-undang yang memberikan kepastian hukum keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar keadilan.

individu tidak hanya melakukan evaluasi terhadap alokasi atau distribusi *outcomes*, namun juga mengevaluasi terhadap keadilan prosedur untuk menentukan alokasi tersebut.<sup>8</sup> Hukum dan keadilan sebenarnya adalah dua elemen yang saling bertaut yang merupakan "*conditio sine qua non*" bagi yang lainnya, Hukum adalah manifestasi eksternal keadilan dan keadilan adalah internal autentik dan esensi roh wujud hukum. Sehingga supremasi hukum (*supremacy of law*) adalah supremasi keadilan (*supremacy of justice*) begitu pula sebaliknya, keduanya adalah hal yang komutatif<sup>9</sup>

Badan kekuasaan kehakiman diatur dalam Bab 9, terdiri dari dua pasal yakni Pasal 24 dan 25. Ditinjau dari segi tata negara, kekuasaan kehakiman identik dengan badan "yudikatif". Menurut

---

<sup>8</sup>Seputarpengertian.blogspot.co.id di unduh 21 agustus 2017

<sup>9</sup>customslawyer.wordpress.hubunganhukumdankeadilan di unduh 10 mei 2017



pasal 24 ayat (1), kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut Undang-Undang. Kemudian dalam penjelasan Pasal 24 dan 25 ditegaskan: Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam Undang- Undang tentang kedudukan para hakim.”.

Dari penjelasan latar belakang di atas penulis tertarik menulis penulisan hukum sebagai syarat menyelesaikan pendidikan strata 1 dengan judul YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG BERSIFAT INKONSTITUSIONNAL BERSARAT(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-IX/2016)

## **B.Rumusan Masalah**

- 1.Apa yang menjadi pertimbangan hukum PutusanMahkamah KonstitusiNomor 33/PUU-IX/2016 yang bersifat inkonstitusional bersyarat Tentang larangan JPU mengajukan peninjauan Kembali ?
- 2.Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2016 yang bersifat inskonstitusional bersyarat di tinjau dari aspek keadilan substantif?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IX/2016 yang bersifat inskonstitusionnal bersyarat?

2. Untuk mengetahui Putusan Nomor 003/PUU-IX/2016 yang bersifat inskonstitusional bersarat di tinjau dari aspek keadilan substantif ?

#### **D.Kegunaan Penelitian**

##### **D.1 Manfaat penelitian**

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan Manfaat berupa sumbangan pemikiran Memperkaya pemahaman tentang Hukum Tata Negara Khususnya Tentang Mahkamah Konstitusi serta masalah Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum

##### **D.2 Kegunaan penelitian**

###### **a. Bagi Penulis**

Manfaat dari penelitian ini bagi penulis adalah untuk menyelesaikan tugas akhir dalam fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang untuk menjadi persyaratan menjadi Sarjana Hukum dan Hasil dari penelitian ini dapatkan ini di harapkan akan menambah wawasan bagi penulis terutama bagi mahasiswa fakultas hukum pada khususnya dan masyarakat indonesia pada umumnya

###### **b. Bagi Masyarakat**

Hasil dari penelitian yang di dapatkan ini di harapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat serta pemahaman baru tentang secara luas terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat konstitusional bersarat dan Peninjauan Kembali serta keadilan prosedural dalam penegakan Hukum

###### **c. Bagi Penegak Hukum**

Hasil penelitian yang di dapatkan di harapkan menjadi masukan bagi Mahkamah Konstitusi agar lebih arif dan bijaksana dalam memutus perkara *yudisial review* serta institusi hukum

yang lain seperti Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung agar lebih saling menjaga independensi dalam Melakukan penegakan hukum.

d. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi ilmu baru terutama tentang Mahkamah Konstitusi dan Peninjauan Kembali yang di lakukan Jaksa Penuntut Umum

e.bagi pemerintah

Hasil penelitian ini dapat mejadi masukan pemerintah agar lebih memperhatikan pembentukan undang undang bersama dewan perwakilan daerah agar meciptakan undang – undang lebih berkuaitas

**E.Manfaat Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memberikan Kontribusi ilmu baru kepada penegak hukum seperti kejaksaan, Mahhkamah Agung, Mahkamah Konstitusi serta para mahasiswa khususnya fakultas hukum.

**F.Metode Penelitian**

F. 1 Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum ini metode yang di gunakan adalah metode pendekatan yuridis Normatif hukum yaitu penelitian hukum yang objek kajian nya meliputi asas asas hukum ketentuan peraturan perundang undangan serta berbagai literature (teori) seperti teori negara hukum,*yudisial review*, *check and balances*,Teori keadilan substantif macam macam putusan Mahkamah Konstitusi seperti teori negara hukum, *yudisial review*, Teori Kekuasaan kehakiman Teori keadilan menurut hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi serta teori lain yang berhubungan dengan penelitian hukumini. Di dalam penulisan Hukum ini penulis menggunakan penafsiran yaitu penafsiran Penafsiran sistematis yaitu penafsiran hukum yang didasarkan atas sistematika pengaturan hukum

dalam hubungannya antarpasal atau ayat dari peraturan hukum itu sendiri dalam mengatur masalahnya masing-masing.

## F.2 Jenis Bahan Hukum

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang di peroleh dari Undang-Undang Dasar NRI 1945 Undang Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 tahun 2003 jo Undang Undang Nomor 8 tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Undang –Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, ,Undang-Undang 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, Undang Undang No 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Buku-Buku.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur kepustakaan yang berupa:

- a) Buku-buku berkaitan dengan permasalahan
- b) Jurnal jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan.
- c) Makalah-Makalah

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan atas bahan hukum sekunder yang berupa kamus-kamus hukum bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum yang di peroleh dari Wikipedia ,kamus dll

## F.3 Studi dokumen

Studi dokumen adalah mengumpulkan bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta dokumen-dokumen yang di dapatkan dari berbai sumber yang berhubungan dengan penelitian ini

#### **F.4Tehnik Analisis Bahan Hukum**

Tehnik yang di gunakan oleh penulis adalah yuridis normatif yang di kenal juga sebagai pendekatan kepustakaan. Pendekatan yuridis normatif yaitu tehnik membandingkan norma norma hukum serta penafsiraan yang di gunakan adalah penafsiran gramatikal yaitu menganalisa Undang Undang dari Tata bahasa dan penafsiran Penafsiran sistematis yaitu penafsiran hukum yang didasarkan atas sistematika pengaturan hukum dalam hubungannya antarpasal atau ayat dari peraturan hukum itu sendiri dalam mengatur masalahnya masing-masing.

#### **G.Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan hukum yang si gunakan oleh penulis terdiri dari BAB 1 sampai BAB IV yaitu BAB 1 Pendahuluan, BAB II Landasan Teori seperti negara hukum, *yudisial review*, Mahkamah Konstitusi Dalam *checks and balances* ,Teori Kekuasaan Kehakiman Teori keadilan substantif dan prosedural keadilan menurut Hans Kelsen, Keadilan Menurut Jhon Rawls. keadilan menurut aritoteles Keadilan dalam persepektif Hukum Nasional ,Keadilan menurut Frans Margis Soseno, keadilan menurut Nitinegoro BAB III Pembahasan rumusan masalah yaitu pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2016 yang bersifat inkonstitusional bersyarat terhadap larangan jaksa Mengajukan Peninjauan Kembali dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2016 yang bersifat inskonstitusional bersyarat di tinjau dari aspek keadilan Substantif BAB IV Kesimpulan dan saran yang akan di jabarkan penulis

#### **BAB 1 Pendahuluan**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang, rumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan pada pokoknya bab ini akan diuraikan gambaran singkat mengenai penulisan hukum yang di angkat oleh Penulis

## **BAB II Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini akan diuraikan tinjauan umum tentang teori hukum seperti *negara hukum*, *judicial Review*, kewenangan kekuasaan Kehakiman di Indonesia Mahkamah Agung, Teori Kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi dalam *checks and balances*, Teori keadilan Substantif dan keadilan prosedural keadilan menurut Hans Kelsen, Keadilan Menurut John Rawls. keadilan menurut Aristoteles Keadilan dalam perspektif Hukum Nasional, Keadilan menurut Frans Margis Soseno, keadilan menurut Nitinegoro Putusan Mahkamah Konstitusi, Pengertian putusan Mahkamah Konstitusi, Jenis putusan Mahkamah Konstitusi

## **BAB III Pembahasan**

Dalam bab ini berisikan tentang hasil penelitian dari pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2016 yang bersifat inkonstitusional bersyarat terhadap larangan jaksa mengajukan Peninjauan Kembali dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2016 yang bersifat inkonstitusional bersyarat di tinjau dari aspek keadilan Substantif

## **BAB IV Penutup**

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran dari permasalahan yang diteliti oleh peneliti serta saran dari penulis dalam menanggapi permasalahan yang diangkat oleh peneliti